

## PERDAGANGAN, KONFLIK, DAN TEOREMA COASE

Trade, Conflict, and Coase Theorem

**Jose Rizal Joesoef**  
Universitas Gajayana, Malang

This paper shows that how costly to establish market and to operate it. It goes almost without saying that conflict arises when actions of one country adversely affect domestic market of other countries, or efforts to protect domestic market have reciprocal effects on other countries. What is the nature of market today? In a free trade system, the ownership of common market occurs, when market expansion by countries has unrestricted access, because no one country owns the common market.

Since market expansion by countries has such excessive access, and no one country is legally allowed to protect its domestic market, then no one country has a claim on its domestic market. When there is unlimited access and no claim on domestic market, the market has qualities of international public good, such as joint consumption and high exclusion costs. When the market becomes international public good, a country tends to overgraze in other countries. Since overgrazing activities of one country inflict the other ones, conflict among countries must develop. The tragedy of the commons is a rule.

**Kata kunci:** barang publik internasional, *overgrazing*, *the tragedy of the commons*, *credible commitment*, teorema Coase, otoritas sentral.

### I. PENDAHULUAN

Kompetisi adalah akibat alamiah dari pertambahan jumlah pelaku pasar. Ia berdampak ganda. Di satu pihak, kompetisi memungkinkan pihak-pihak yang saling berinteraksi untuk bekerjasama, sejauh ada saling ketergantungan di antara mereka. Di pihak lain, kompetisi berpotensi membangkitkan konflik serius di dalam pasar.

Dalam perekonomian terbuka-bebas-global, potensi-potensi konflik dalam perdagangan perlu diwaspadai.<sup>1</sup> Keterbukaan dan globalisasi eko-

<sup>1</sup> Pada tahun 1980 hingga 1988, perselisihan perdagangan dalam kerangka GATT-WTO, tercatat ada 76 kasus. Angka ini setiap tahun cenderung semakin naik. Lihat Bhagwati (1991:115-25).

nomi memudahkan setiap negara untuk saling menyoroti segala upaya untuk mendorong ekspor, lebih-lebih upaya untuk membatasi impor. Konsekuensinya, kebijakan perdagangan yang bersifat protektif dan *predatory*—yang tentunya merugikan negara mitra dagang—akan disoroti, dikeskam, dan digugat oleh negara mitra dagang.

Realitas dalam perdagangan internasional sering menampilkan gejala-gejala konflik, seperti perang tarif, aksi embargo, aksi boikot, dll. Gejala ini bisa dimengerti, mengingat semua negara ingin surplus sekaligus semua negara tidak ingin defisit. Semua ingin mengekspor tapi semua juga ingin mengurangi impor. Padahal, surplus negara satu adalah defisit negara lain. Ekspor negara satu adalah impor negara lain, kecuali ada planit selain bumi yang mampu menyerap kelebihan ekspor.

Perekonomian terbuka-bebas, yang mengharamkan proteksionisme, mengandung arti bahwa semua negara memiliki kebebasan mengakses pasar domestik negara lain. Artinya, tidak ada satu negara pun yang bisa menghaki pasar domestiknya—sebagai akibat larangan sistem pasar tertutup. Ketika semua negara memiliki kebebasan itu, dan tidak ada satu negara pun yang bisa menghaki pasar domestiknya, maka pasar domestik menjadi semacam barang publik internasional (*international public good*).

Ketika pasar menjadi barang publik internasional dan tidak ada penghalang (*barrier*) bagi upaya ekspansi ke pasar internasional, maka rasionalitas ekonomi mengajarkan bahwa masing-masing negara cenderung *overgrazing* di negara lain. Ketika negara merasa terganggu oleh aktivitas *overgrazing* itu, intuisi kita bisa menduga akibatnya, yakni konflik. Selama biaya resolusi konflik tinggi, tensi dan frekuensi konflik cenderung meningkat, dan kaidah pasar menjadi *the tragedy of the commons*.<sup>2</sup>

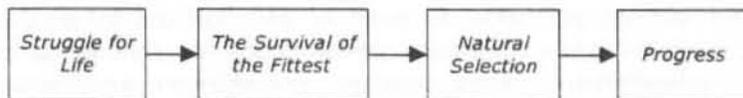
Sejenak terasa ironis dan merisaukan. Pasar bebas dan globalisasi menghasilkan kerjasama antarnegara di banyak bidang, sekaligus berpotensi memuncratkan percikan-percikan api dari persinggungan di antara mereka. Krugman (1987), dengan perspektif *game theory*, melihat bahwa apa yang dibayangkan ekonom *Ricardian* tidak seindah kenyataannya. Konflik perdagangan justru lebih menonjol ketimbang harmoni dalam perdagangan. Kegalauan hati Krugman ini terungkap dalam artikelnya yang berjudul *Is Free Trade Passé? (Apakah Perdagangan Bebas Telah Mati?)*.

Ironisme tersebut membawa artikel ini kepada perlunya kajian kritis tentang mengapa dan bagaimana persaingan yang bernuansa konflik—seperti yang dilaporkan oleh Bhagwati (1991)—bisa menjadi sebuah paradigma atau *pattern* dalam perdagangan internasional. Pemahaman tentang *nature* daripada konflik, akan memberikan alternatif pijakan untuk menentukan bagaimana seharusnya konflik perdagangan diantisipasi dan diresolusi.

## II. KOMPETISI DAN KONFLIK

<sup>2</sup> Istilah *overgrazing* dan *the tragedy of the commons* berasal dari Hardin (1968) dalam Baker & Elliot (1990:111-23).

Charles R. Darwin (1809-1882) menyatakan bahwa panggung kehidupan ini ibarat medan peperangan, yang di dalamnya setiap makhluk hidup saling beradu kekuatan (Veeger, 1990:46-48). Semua makhluk membutuhkan materi tertentu, tempat, lingkungan yang cocok, agar tetap hidup. Namun pasok "barang-barang" itu tidak mampu melayani kebutuhan mereka. Kelangkaan dan kekurangan menyebabkan persaingan dan perebutan, dan siapa yang menang dalam perebutan adalah siapa yang lebih kuat. Darwin melukiskan dunia ini seperti dalam alur berikut:



Yang diamati Darwin adalah dunia hewan. Namun logika Darwin tentang kompetisi biologis merambah masuk ke dalam ilmu sosial (Hirshleifer 1985) sehingga melahirkan pendekatan *Darwinian* dalam sosiologi maupun ekonomika. Hirshleifer (1978) mengatakan demikian:

Competition is the all-pervasive law of natural economy interactions. The source of competition is, of course, the limited source base of the globe in the face of the universal Malthusian tendency to multiply. By natural selection, the biosphere has come to be filled by life forms successful at multiplying and pressing upon one another for command over resources. This teeming of life is therefore both cause and consequence of biological competition (h. 238-239).

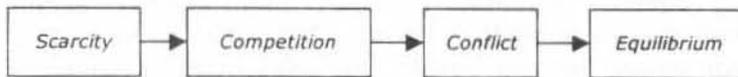
Jadi, konflik atau *struggle for life* adalah konsekuensi alamiah dari pertambahan jumlah pelaku pasar di dalam situasi *limited source*.

Menurut *Microsoft Bookshelf 2000*, konflik didefinisikan sebagai: (1) *A state of disharmony between incompatible or antithetical persons, ideas, or interests*; (2) *a clash*; (3) *A psychic struggle, often unconscious, resulting from the opposition or simultaneous functioning of mutually exclusive impulses, desires, or tendencies*. Definisi pertama dan kedua merujuk pada konflik *substantive*, sedangkan yang ketiga pada konflik *emotional* (Schemerhorn, Hunt, & Osborn, 1995:203-204). Konflik substansif disulut oleh perbedaan tujuan atau kebijakan, dan ia lebih berdimensi *interpersonal*. Konflik emosional disebabkan ketidakmampuan kita mengendalikan perasaan-perasaan seperti marah, tidak percaya, benci, dan takut, dan ia berdimensi *intrapersonal*.

Kompetisi yang mengarah ke kemajuan (*Darwinian progress*) dan keseimbangan tidak selalu harus melalui konflik, tapi bisa melewati kerjasama atau kompromi (Lee 1991). Jika kerjasama dan konflik adalah dua paradigma yang berbeda, persoalannya adalah, "Bagaimana konflik atau kerjasama bisa menciptakan kemajuan dan keseimbangan sistem sosial?"

Kata kunci untuk memahami konflik, baik yang bersifat substansif maupun emosional, adalah "dualisme." Keseimbangan sistem terbentuk setelah terjadi konflik di antara dua atau lebih kepentingan (*interest*) atau keinginan (*desire*) yang berbeda. Dualisme atau perbedaan ini adalah unsur

utama pencipta keseimbangan sistem. Secara umum, pendekatan ini dapat dilukiskan dalam alur berikut:



Eksistensi teori 'keseimbangan antagonis' ini bisa dimulai dari pemikiran Karl Marx (1818-1883). Marx memahami bahwa realitas kehidupan masyarakat ditentukan dan dibentuk melalui pertentangan dua kelas yang terlibat dalam proses produksi. Dua kelas antagonis ini adalah kelas industriawan (borjuis) yang memiliki mesin produksi, dan kelas buruh (proletar) yang diandaikan hanya berhak melahirkan keturunan (Veeger, 1990:210).

Ralf Dahrendorf (1929- ) membangun teori konflik dengan menggunakan gaya retorika Marx, walaupun ia tidak mau disebut bayangan Marx. Berbeda dengan Marx yang menekankan pada kepemilikan (*ownership*), Dahrendorf lebih menekankan pada fungsi kontrol. Pendekatan Dahrendorf didasarkan pada asumsi:

- ❑ Organisasi sosial adalah terkoordinasi secara tidak sukarela (*imperatively coordinated*), artinya masyarakat dilihat sebagai asosiasi yang anggotanya ditempatkan secara paksa dalam suatu pola.
- ❑ Dalam setiap organisasi pasti ada dikotomi yang tak terelakkan, yaitu mereka yang menggunakan fungsi kontrol dan mereka yang tunduk pada penggunaan otoritas itu.

Kepentingan "kelas berkuasa" adalah mempertahankan dominasi kekuasaannya atau kontrolnya, sedangkan kepentingan "kelas dikuasai" adalah menantang dominasi itu. Bagi Dahrendorf dualisme ini ada di mana-mana, sehingga konflik berpotensi ada di mana-mana, bahkan di dalam satuan masyarakat terkecil (keluarga). Menurut Dahrendorf, konflik terbuka terjadi ketika orang-orang yang mempunyai kepentingan seragam, secara sadar bekerjasama dan menggerombol (Veeger, 1990:214-219).

Pandangan Marx dan Dahrendorf terhadap konflik agaknya cukup merisaukan. Seolah-olah mereka menyamakan konflik dengan sakit flu. Ini berarti konflik tidak bermanfaat, harus dihindari, dan sebisa mungkin dihilangkan. Bisa disetujui bahwa konflik dan flu bersifat abstrak, yang keduanya hanya nampak dari gejala-gejalanya. Flu biasanya mempunyai gejala-gejala seperti pusing, demam, dan sakit kepala; sementara konflik ditandai dengan perselisihan, perdebatan, perkelahian, dll. Namun saya kurang setuju dengan pengandaian bahwa keduanya adalah penyakit. Memang benar konflik harus dihindari, tapi tidak selalu benar bahwa konflik harus dilenyapkan.

Menurut Vilfredo Pareto (1848-1923), masyarakat ditegakkan oleh individu-individu yang senantiasa mengarah menuju keseimbangan, yaitu pemulihan setelah terjadi konflik atau pergolakan. Individu-individu saling mempengaruhi, agar keseimbangan tercapai. Menurut Pareto, ada dua daya (*stabilizing force*) yang memungkinkan terjadinya pemulihan keseimbangan, yaitu:

- Setiap individu cenderung menggabungkan hal-hal yang tidak ada hubungannya satu sama lain, sehingga menjadi kombinasi baru. Mereka juga cenderung bersatu dengan orang lain, meneladani, dan menyesuaikan diri dengan mayoritas. Kecenderungan ini disebut *the instinct of combination*.
- Setiap individu cenderung mempertahankan kombinasi yang telah dibuatnya, dan menjaga diri atau berhati-hati sebagai individu yang utuh. Kecenderungan ini disebut *the persistence of aggregates*.

Akibat pengaruh daya pertama, manusia selalu aktif mencari kombinasi-kombinasi baru. Bahkan, ia mencoba mencari hubungan kausal dua realitas yang tidak ada hubungannya sama sekali. Misalkan, seseorang mengasosiasikan malapetaka yang menimpa dirinya dengan perbuatan yang ia alami sebelumnya; menghubungkan takhayul dengan teori-teori ilmiah; atau menghubungkan nasionalisme dengan kebijakan ekonomi. Akibat pengaruh daya kedua, manusia segan akan adanya perubahan. Daya ini melatarbelakangi sikap konservatif manusia. Oleh karena itu, Pareto optimis bahwa konflik, pergolakan, peperangan hanya bersifat sementara (Veeger, 1990:69-83).

William G. Sumner (1840-1910) berteori bahwa setiap individu/kelompok mempunyai perasaan yang kuat untuk mendefinisikan dirinya ke dalam sebuah kelompok, kemudian mempertentangkan kelompoknya dengan kelompok lainnya. Sumner melihat ada korelasi positif antara etnosentrisme kelompok itu dengan solidaritas. Artinya, semakin besar yang pertama, semakin besar yang kedua (Veeger, 1990:120-127). Secara spesifik, Sumner menopang teorinya dengan lima asumsi berikut ini:

- Manusia cenderung berkelompok.
- Disadari atau tidak, di dalam kelompok timbul perasaan kuat untuk membedakan antara *we-group* dengan *they-group*.
- Tiap kelompok cenderung membanggakan kelompoknya sendiri, mengunggulkan ajaran-ajarannya, membanggakan konsep-konsepnya, mengunggulkan rasnya, membanggakan keturunannya, dll.
- Tiap kelompok cenderung saling meremehkan, mengejek dan memusuhi kelompok lainnya. Mereka menjadi kelompok etnosentris.
- Tiap kelompok cenderung ingin menantang (mengajak berkelahi) kelompok lainnya. Jika dua kelompok etnosentris semacam ini bertemu, terjadilah konflik antarkelompok.

Berdasarkan lima asumsi tersebut, Sumner merasa yakin bahwa ketika konflik antarkelompok terjadi—atau mungkin sengaja diciptakan, maka semakin kuatlah rasa persatuan anggota-anggotanya untuk membela kelompoknya. Artinya, ada korelasi positif antara etnosentrisme dengan solidaritas. Katanya, "Keadaan perang melawan orang luar akan menciptakan perdamaian di kalangan sendiri." Bisa dibayangkan bahwa ketika suatu negara menderita krisis ekonomi yang menjurus ke krisis sosial, kemudian negara menempatkan negara lain sebagai biang krisis, maka ikatan solidaritas dalam komunitas domestik-internal cenderung semakin kuat. Memposisikan negara lain sebagai biang masalah, akan memperkuat tingkat kohesivitas penduduk suatu negara.

### III. KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN AKSI KOLEKTIF

Sudah semestinya negara atau pemerintah menyediakan barang-jasa publik (*public good*). Aktivitas ini bergerak harmonis dengan meningkatnya jumlah penduduk berikut kebutuhan-kebutuhannya. Ekonomika mengajarkan bahwa barang publik adalah sesuatu yang memenuhi kondisi *joint consumption* dan *high exclusion cost*. Kedua kondisi ini berkualitas *nonrivalrous*, artinya semua orang seketika bisa mengkonsumsinya pada saat bersamaan (Oakland, 1987).

Dengan mengibaratkan negara sebagai sebuah organisasi atau kelompok yang menyediakan jasa bagi anggotanya, Olson (1971:16) lebih suka menggunakan istilah barang kolektif (*collective good*) ketimbang barang publik. Barang kolektif adalah barang kelompok yang eksklusif. Barang kolektif adalah barang yang mensyaratkan biaya *exclusion* tinggi, jika hendak menghalangi anggota organisasi untuk tidak mengkonsumsinya. Ini berarti barang publik yang murni, seperti pertahanan-keamanan, hukum, kebijakan negara, dll., bisa disebut sebagai barang kolektif negara. Dalam konteks ekonomi-politik internasional, barang-barang tersebut bersifat *rivalrous*. Negara satu tidak bisa mengkonsumsi kebijakan ekonomi dan politik negara lain (Kindleberger, 1986).

Pengertian barang kolektif tersebut mudah-mudahan menjadi lebih jelas dengan menyimak pernyataan berikut. Jika sesuatu tidak dikhususkan untuk satu orang pun, maka ia akan dinikmati semua orang. Ketika tidak ada satu orang pun menghakinya dan semua orang bisa menikmatinya, maka sesuatu itu menjadi hak semua orang. Ketika semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati sesuatu itu, dan tidak ada satu orang pun yang menghakinya, maka sesuatu itu menjadi barang kolektif.

Menurut Buchanan & Tullock (1962:13), "*Collective action is viewed as the action of individuals when they choose to accomplish purposes collectively rather than individually...*" Kalau kebijakan perdagangan merupakan barang kolektif negara, persoalannya adalah, "Bagaimana aksi kolektif (*collective action*) bisa muncul ketika kebijakan negara mendapat reaksi dari negara lain?" Lebih tepatnya: "Bagaimanakah *rationale* munculnya aksi kolektif Indonesia manakala kebijakannya disoroti, dikecam, dan digugat oleh negara lain?"

Stiglitz (1989) berpendapat bahwa transaksi di dalam organisasi atau pasar biasanya dilakukan secara sukarela. Namun transaksi antara penyelenggara negara dengan masyarakat (rakyat) dalam suatu negara bisa jadi sebaliknya. Stiglitz berargumen demikian:

I would argue that there are two distinguishing features of the State, from which most of the other differences between the State and other economic organizations follow: the State is the one organization membership of which is *universal*, and the State has powers of *compulsion* not given to other economic organizations (h. 98).

Keanggotaan penduduk dalam suatu negara bersifat universal. Artinya, tidak ada satu orang pun mempertimbangkan negara sebagai *a matter of choice*. Setiap orang telah ditakdirkan tinggal di negara tertentu, sehingga ia menjadi subyek negara (*subject to the State*). Sedangkan *compulsion* mengandung arti bahwa ketika individu tidak puas dengan kebijakan negara, suka atau tidak, ia harus menerimanya (*no right to exit*).

Mungkin sebagian dari kita bertanya tentang tingkat kohesivitas aksi kolektif masyarakat dalam suatu negara. Mereka berargumen bahwa semakin rendah tingkat kohesivitas internal suatu organisasi, maka semakin menurun efektivitas aksi kolektifnya. Penulis berpendapat bahwa persatuan di antara kita cenderung semakin kuat ketika berkonfrontasi dengan mereka. Dalam konteks perdagangan, pergulatan kepentingan antarnegara cenderung menciptakan dan memperkokoh solidaritas penduduk di dalam suatu negara.

Friedman & Friedman (1980) menangkap kesan bahwa kebijakan negara yang beralih demi kepentingan domestik cenderung dibenarkan dan disepakati semua pihak, tak terkecuali para ekonom. Mereka mengatakan:

It is often said that bad economic policy reflects disagreement among the experts; that if all economists gave the same advice, economic policy would be good. Economists often do disagree, but that has not been true with respect to international trade (Friedman & Friedman, 1980:327).

Jadi, adalah benar bahwa ketidaksepakatan sering muncul dari proses penentuan kebijakan, tapi tidak selalu benar jika kebijakan itu berkaitan dengan perdagangan antarnegara atau 'demi kepentingan nasional' (Hadiz, 1997). Ini jelas mendukung tesis Sumner, bahwa pergulatan kepentingan antarkelompok (atau antarnegara) cenderung menciptakan dan memperkokoh solidaritas anggota kelompok (atau penduduk suatu negara).<sup>3</sup>

#### IV. TEOREMA COASE

Tidak bisa disangkal bahwa dalam perdagangan internasional sering menampilkan gejala-gejala konflik. Gejala ini mudah dipahami oleh karena teori dan fakta sering menunjukkan bahwa keuntungan suatu negara adalah kerugian negara lain, kekayaan suatu negara adalah kemiskinan negara lain, dominasi suatu negara adalah ketergantungan negara lain. Ekspor

<sup>3</sup> Berdasarkan hipotesis Sumner dan Friedman & Friedman, terbukti bahwa meskipun sebuah kebijakan domestik dianggap *unfair*, tidak efisien, dan cacat hukum; ekonom dan pakar politik Indonesia cenderung untuk mempertahankan kepentingan domestik ketika kebijakan itu dikecam negara Jepang. Silahkan baca laporan studi Jamli & Joesoef (1999).

suatu negara adalah impor negara lain. Devaluasi matauang suatu negara adalah apresiasi matauang negara lain. Surplus suatu negara adalah defisit negara lain. Hutang suatu negara adalah piutang negara lain. Dan mungkin, kebangkitan suatu negara dibiayai oleh kebangkrutan negara lain.

Pilihannya bukan kerjasama atau konflik. Keduanya bergerak bersama. Di satu pihak perdagangan bebas menciptakan ketergantungan dan kerjasama antarnegara, di pihak lain ia berpotensi membangkitkan konflik antarnegara. Jadi, persoalannya adalah bagaimana mengadakan sistem kelembagaan yang menjamin adanya biaya resolusi konflik murah.

Ronald H. Coase (1960), pemenang Nobel bidang ekonomika 1991, melihat perlunya tatanan (*arrangement*) yang menjamin biaya negosiasi murah. Berdasarkan asumsi pasar persaingan sempurna, Coase mengawali diskusinya dengan kalimat berikut:

The question is commonly thought of as one in which A inflicts harm on B and what is to be decided is: how should we restrain A?. But this is wrong. We are dealing with a problem of a reciprocal nature. To avoid the harm to B would inflict harm on A. The real question that has to be decided is: should A be allowed to harm B or should B be allowed to harm A? The problem is to avoid the more serious harm (h. 125).

Maksud pernyataan di atas kira-kira adalah berikut ini. Jika A dan B berselisih, maka adalah keliru menyoal bagaimana menghukum pihak pengganggu (A). Harus diwaspadai bahwa menempatkan salah satu pihak sebagai terpidana, belum tentu menyelesaikan masalah, bisa-bisa berdampak negatif terhadap pihak yang diganggu (B), atau bahkan terhadap sistem. Katakanlah A dihukum denda. A akan memperhitungkan dendanya sebagai faktor pengurang hasil produksinya. Sebagai *price taker*, B akan terimbas oleh dendanya A. Akibatnya "sistem A+B" menjadi tidak efisien. Menurut Coase, selama pasar bisa mengatasi konflik, tidak ada cukup alasan bagi otoritas sentral untuk turun tangan. A dan B secara alamiah akan bernegosiasi untuk menentukan siapa yang bersalah, siapa yang harus membayar ganti rugi, berapa dendanya, dll.

Namun demikian realitas menunjukkan bahwa biaya negosiasi itu sangat tinggi. Tidaklah mudah menentukan siapa yang salah, menaksir kerugian, menetapkan denda/kompensasi, apalagi mencapai kesepakatan. Resolusi konflik akan memakan uang, tenaga, dan waktu. Mengingat biaya resolusi konflik yang tinggi dan dampak negatif denda (*spillover effect*), persoalan utamanya (*the real question*) adalah, "Apakah konflik dibiarkan saja atau segera dihentikan?" Selama biaya sosial konflik lebih tinggi dari biaya sosial denda, maka denda harus dipaksakan oleh otoritas sentral. Gagasan ini dikenal dengan sebutan *Coase theorem*.

Farrell (1987) berpendapat bahwa "dunia Coase" belum menjamin adanya *bargaining* yang efisien, selama ada informasi sepihak (*hidden*). Kondisi ini memberi peluang pihak yang menguasai informasi untuk berbohong atau melakukan *moral hazard*. Farrel mensyaratkan adanya otoritas sentral yang berkualitas dan bisa mengorek (*reveal*) informasi.

## V. BURNS THE BRIDGES BEHIND YOU

Sebuah kata yang sering bersanding dengan kata "konflik" adalah kata "resolusi." Penggabungan dua kata ini menjadi "resolusi konflik," bukanlah tanpa sengaja, melainkan berdasarkan kekuatan (*power*) kata "resolusi" itu sendiri. Dalam bahasa Inggris (*Microsoft Bookshelf 2000*), *resolution* tidak saja berarti *a resolving to do something*, tetapi juga *firm determination*.

Sehubungan dengan kosakata *conflict*, pengertian *resolution* yang kedua tersebut bisa diterjemahkan menjadi: penentuan (*determination*) langkah strategis kita secara kokoh (*firm*) sehubungan dengan langkah lawan. Dengan kata lain, resolusi konflik adalah sebuah upaya untuk menentukan langkah strategis (*strategic move*) dan mengikatkan komitmen kita kepada langkah itu, dengan harapan langkah lawan mengikuti kemauan kita. Kata Dixit & Nalebuff (1991:120),<sup>4</sup> "A *strategic move* is designed to alter the beliefs and actions of others in a direction favorable to yourself."

Supaya komitmen berkualitas *credible*, pihak-pihak yang terlibat konflik sebaiknya menyatakan komitmennya secara tertulis, dan agar lebih *credible* lagi, disaksikan pihak ketiga. Usaha ini semata-mata untuk membuat *moral hazard* menjadi mahal jika hendak dilakukan.

Namun situasi konflik sering membuat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak bisa menahan diri. Masing-masing pihak saling mengumbar strategi. Menghapus beberapa kemungkinan strategi atau *burns the bridges behind you*, bisa membuat komitmen kita menjadi *credible*.

Peperangan biasanya dipicu oleh tindakan-tindakan provokatif. Ketika kedua pihak saling mengancam, ancaman-ancaman itu berdampak strategis, artinya lawan akan menangkapnya sebagai strategi-strategi baru. Semakin banyak alternatif strategi atau ancaman, semakin kecil probabilitas untuk mencapai titik kesepakatan (*focal point*). Pembatasan pilihan (atau menahan diri) akan menambah kredibilitas dari suatu komitmen.<sup>5</sup>

## VI. PENUTUP

Dalam pasar bebas, semua negara memiliki kebebasan mengakses pasar domestik negara lain—sebagai akibat larangan sistem pasar tertutup. Ini artinya tidak ada satu negara pun yang bisa menghaki pasar domestik-

<sup>4</sup> Kata Schelling (1978:229), "A behavior propensity is strategic if it influences others by affecting their expectations." Sementara Cudd (1993:117) membenturkan model interaksi strategis dengan interaksi parametris seraya mengatakan, "Parametric (as opposed to strategic) models of interaction assume that agents take the others' actions to be fixed according to a small set of predeterminable parameters."

<sup>5</sup> Pembatasan pilihan sehingga menjadi dua, membuat kita seolah-olah harus memilih antara hidup atau mati. Langkah ini membuat komitmen semakin *credible*.

nya, dengan menggunakan dalih *national security*. Ketika semua negara memiliki akses tak terbatas ke pasar domestik negara lain, dan tidak ada satu negara pun yang bisa menghaki pasar domestiknya, maka pasar domestik seolah-olah menjadi barang publik internasional (*international public good*).

Ketika pasar menjadi barang publik internasional dan tiada maaf bagi penghalang (*interventionist*) sistem perdagangan bebas, teori *the tragedy of the commons* meramalkan bahwa suatu negara cenderung *overgrazing* di pasar domestik negara lain. Ketika suatu negara merasa terganggu oleh aktivitas *overgrazing* negara lain, dapat dibayangkan akibatnya, yaitu konflik. Selama biaya resolusi konflik tinggi, tensi dan frekuensi konflik cenderung meningkat.

Di samping itu, perdagangan bebas merupakan agenda yang tak terelakkan, sementara kerjasama atau konflik adalah dua akibat ekstrem dari perdagangan bebas. Secara intuitif, kerjasama dalam persaingan bebas membuat sistem dan produktivitas menjadi lebih besar, ketimbang konflik dalam persaingan bebas. Tentu, impiannya adalah keseimbangan yang melewati kerjasama bukan melalui konflik, seperti proses berikut:



Misalkan ada dua negara: Prinsipal dan Agen. Mereka dianggap dua pemain yang bertransaksi, dan diharapkan bermain dengan 'baik' supaya *traffic* transaksi berjalan tertib dan teratur. Semua negara diandaikan tahu tentang apa yang diharapkan dari aktivitas mereka. Apa yang ditetapkan sebagai hak Prinsipal diakui oleh Agen sebagai kewajibannya, dan apa yang ditetapkan sebagai hak Agen diakui Prinsipal sebagai kewajibannya. Sayangnya, interaksi atau permainan ini akan berjalan dengan baik ketika ia memenuhi beberapa syarat seperti *complete information* dan biaya resolusi konflik nol.

Kenyataan menunjukkan bahwa ketika terjadi konflik, biaya resolusi konflik sangatlah tinggi. Tidaklah murah menentukan siapa yang salah, menaksir kerugian sosial, menetapkan denda atau kompensasi, apalagi mencapai kesepakatan. Resolusi konflik akan banyak memakan uang, tenaga, dan waktu. Kehadiran pihak ketiga dalam situasi konflik rasanya cukup menjanjikan. Namun *Coase theorem* mengingatkan bahwa kehadiran pihak ketiga atau otoritas sentral, bukan semata-mata untuk menghukum siapa yang salah, tapi untuk membandingkan antara total efek konflik dengan total efek hukuman. ■

## Daftar Pustaka

- Bhagwati, J. (1991). *The World Trading System at Risk*. New York: Harvester-Wheatsheaf.

- Buchanan, J. M. & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Coase, R. H. (1960). "The Problem of Social Cost." Dalam S. Baker & C. Elliot (eds.), *Readings in Public Sector Economics*. 1990, 124-139, Lexington, Mass.: D.C. Heath.
- Cudd, A. E. (1993). "Game Theory and the History of Ideas about Rationality: An Introductory Survey." *Economics and Philosophy*. Vol. 9, 101-133.
- Dixit, A. K. & Nalebuff, B. J. (1991). *Thinking Strategically: The Competitive Edge in Business, Politics, and Everyday Life*. New York: W. W. Norton.
- Farrell, J. (1987). Dalam S. Baker & C. Elliot (eds.), *Readings in Public Sector Economics*. 1990, 165-174, Lexington, Mass.: D.C. Heath.
- Friedman, M. & Friedman, R. (1980). "Tyranny of Controls." Dalam J. L. Doti & D. R. Lee (eds.), *The Market Economy: A Reader*. 1991, 326-338, Los Angeles: Roxbury.
- Hadiz, V. R. (1997). "Ekonomi Politik Kepentingan Nasional." *Prisma*, No. 5, 75-77.
- Hardin, G. (1968). "The Tragedy of Commons." Dalam S. Baker & C. Elliot (eds.), *Readings in Public Sector Economics*. 1990, 111-123, Lexington, Mass.: D.C. Heath.
- Hirshleifer, J. (1978). "Competition, Cooperation, and Conflict in Economics and Biology." *American Economic Review*. Vol. 68 (2), 238-243.
- Hirshleifer, J. (1985). "The Expanding Domain in Economics." *American Economic Review*. Vol. 75 (1), 53-68.
- Jamli, A. & Joesoef, J. R. (1999). "Analisis Konflik Indonesia-Jepang di dalam Pasar Otomotif: Penerapan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Game Theory*." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 14, 17-33.
- Kindleberger, C. P. (1986). "International Public Goods without International Government." *American Economic Review*, Vol. 76 (1), 1-13.
- Krugman, P. R. (1987). "Is Free Trade Passé?" Dalam P. King (ed.), *International Economics and International Policy: A Reader*. Edisi II, 1995, 21-32. New York: McGraw-Hill.
- Lee, D. R. (1991). "The Political Economy of Social Conflict, or Malice in Plunderland." Dalam J. L. Doti & D. R. Lee (eds.), *The Market Economy: A Reader*. 1991, 230-236, Los Angeles: Roxbury.
- Oakland, W. H. (1987). "Theory of Public Goods." Dalam A. J. Auerbach & M. Feldstein (eds.), *Handbook of Public Economics*. Vol. II, 1987, 485-535, Amsterdam: North-Holland.
- Olson, M. (1971). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge: Harvard University Press.
- Schelling, T. C. (1978). "Altruism, Meanness, and Other Potentially Strategic Behaviors." *American Economic Review*. Vol. 68, 229-230.
- Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., & Osborn, R. N. (1995). *Basic Organizational Behavior*. New York: John Wiley & Sons.
- Stiglitz, J. E. (1989). "On the The Economic Role of the State," Dalam A. Heertje, A. (ed), *The Economic Role of the State*. 1989, 9-85, Cambridge: Basil Blackwell.
- Veeger, K. J. (1990). *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.

---

**Jose Rizal Joesoef** adalah dosen ekonomika pada Universitas Gajayana Malang. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya tahun 1993 dan gelar Magister Sains bidang Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan (IESP) dari Universitas Gadjah Mada tahun 1998. E-mail: joserizal\_j@yahoo.com

---

# JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN

*Journal of Economics and Management*

Volume 1, Nomor 1

Juni 2000

**Partisipasi dalam Penganggaran dan  
Prestasi Manajer: Pengaruh Komitmen  
Organisasi dan Informasi *Job-Relevant***

Rosidi

**Studi tentang Pengaruh Timbal Balik antara  
Kepuasan Pekerjaan dan Kepuasan Keluarga:  
Analisis Model Struktural**

Azis Yasin

**Tantangan dan Peluang Teknologi Industri  
dalam Perspektif Manajemen Teknologi**

Muhammad A. M. Oktaufik

**Perdagangan, Konflik, dan Teorema Coase**

Jose Rizal Joesoef

**Praktik Sumber Daya Manusia yang Progresif:  
Upaya Membangun Keunggulan Bersaing**

Teguh Prasetyo

**Penentuan Lokasi dengan Menerapkan  
*Analytic Hierarchy Process (AHP)***

Sulistiyanti

**Peranan Investasi dan BUMN dalam Pemulihan  
Ekonomi Indonesia: Pandangan, Kebijakan, Strategi,  
dan Program Pemerintah**

M. Rozy Munir

**Telaah Literatur**



# JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN

ISSN 1411-5794

*Journal of Economics and Management*

## DEWAN PENYUNTING

### Penyunting Ahli

Abdul Halim  
*Universitas Gajayana, Malang*

Ahmad Jamli  
*Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*

Bambang Subroto  
*Universitas Brawijaya, Malang*

Carunia M. Firdausy  
*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*

Edi Purwo Saputro  
*Universitas Muhammadiyah Surakarta*

Fatik Rahayu  
*Universitas Trisakti, Jakarta*

Imam Suyitno  
*Universitas Negeri Malang*

James Daniel D. Massie  
*Universitas Sam Ratulangi, Manado*

Kusdi Rahardjo  
*Universitas Brawijaya, Malang*

Mochammad Rosul  
*Departemen Keuangan*

Munawar Ismail  
*Universitas Brawijaya, Malang*

Y. Sri Susilo  
*Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

### Pemimpin Umum

Agus Suman

### Ketua Penyunting

Jose Rizal Joesoef

### Penyunting Pelaksana

Teguh Prasetyo (*chief*)

Djuni Farhan

Sri Hastuti

Sugeng Mulyono

Umi Muawanah

*Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JEM)*—terbit pertama pada tahun 2000—adalah jurnal untuk informasi dan pembahasan masalah-masalah ekonomi, manajemen, dan bisnis. JEM diterbitkan setiap bulan Juni dan Desember, berisi ringkasan hasil penelitian, artikel ilmiah, telaah kritis, atau gagasan murni untuk dikomunikasikan kepada masyarakat luas.

JEM mengundang tulisan dari berbagai kalangan utamanya kalangan peneliti, dosen, pengamat ekonomi, praktisi bisnis, dan mahasiswa. Tulisan dalam JEM tidak selalu segaris dengan pendapat dewan penyunting. Dewan penyunting dapat menyingkat dan memperbaiki naskah yang hendak dimuat tanpa bermaksud mengubah substansinya. Isi pokok tulisan yang dimuat bukan tanggung jawab dewan penyunting. Surat-menyurat mengenai naskah, langganan, dan lainnya dapat ditujukan kepada

Teguh Prasetyo, **JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN**  
Program Magister Manajemen Universitas Gajayana  
Jl. Mertojoyo, Blok L, Malang 65144, Indonesia  
Telp.: 0341-562411, Fax: 0341-582168

JEM	Vol. 1	No. 1	Hlm. 1-98	Malang Juni 2000	ISSN 1411-5794
-----	--------	-------	-----------	---------------------	-------------------